

Nomor : B-1032/DJIKP.2/IK.03.04/06/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Publikasi Iklan Layanan Masyarakat COVID-19

Jakarta, 22 Juni 2021

Kepada Yth.

1. Asisten Deputi/Kepala Pusat/Kepala Biro Humas Kementerian dan Lembaga
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
- (sesuai daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) terus melakukan komunikasi publik khususnya terkait penerapan protokol kesehatan 3M sebagai langkah pencegahan. Narasi ini perlu digaungkan secara luas oleh seluruh instansi pemerintah untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terlebih mengingat terus meningkatnya jumlah kasus baru dan kematian akibat COVID-19 secara drastis.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerja sama dari Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi (selanjutnya dapat disampaikan kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota) untuk turut serta mempublikasikan secara masif Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Gerakan Pakai Masker melalui media sosial, videotron (jika ada) dan berbagai saluran lain yang dimiliki atau dikelola oleh masing-masing instansi. Adapun materi publikasi tersebut dapat diunduh melalui <https://komin.fo/ILMPakaiMasker>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Tata Kelola dan
Kemitraan Komunikasi Publik,



Bambang Gunawan

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
2. Sekretaris Jenderal Kementerian dan Lembaga
3. Sekretaris Daerah Provinsi Seluruh Indonesia

Lampiran Surat : Publikasi Iklan Layanan
Masyarakat COVID-19
Nomor : B-1032/DJIKP.2/IK.03.04/06/2021
Tanggal : 22 Juni 2021

Daftar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi

A. Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Luar Negeri
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Pertahanan
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Kementerian Perdagangan
11. Kementerian Perindustrian
12. Kementerian Kesehatan
13. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
14. Kementerian Keuangan
15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. Kementerian Pemuda dan Olahraga
20. Kementerian Pertanian
21. Kementerian Ketenagakerjaan
22. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Perhubungan
26. Kementerian Komunikasi dan Informatika
27. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29. Kementerian Agama
30. Kementerian Riset dan Teknologi
31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
32. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
33. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
34. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
35. Majelis Permusyawaratan Rakyat
36. Dewan Perwakilan Rakyat
37. Dewan Perwakilan Daerah
38. Sekretariat Kabinet
39. Sekretariat Wakil Presiden

40. Badan Pemeriksa Keuangan
41. Mahkamah Agung
42. Mahkamah Konstitusi
43. Kejaksaan Agung
44. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
45. Kepolisian Republik Indonesia
46. Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia
47. TNI AD
48. TNI AU
49. TNI AL
50. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
51. Lembaga Ketahanan Nasional
52. Komisi Pemberantasan Korupsi
53. Badan Intelijen Negara
54. Badan Kepegawaian Negara
55. Badan Koordinasi Penanaman Modal
56. Komisi Pemilihan Umum
57. Badan Pusat Statistik
58. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
59. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
60. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
63. Badan Siber dan Sandi Negara
64. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
65. Badan Standardisasi Nasional
66. Badan Tenaga Nuklir Nasional
67. Komisi Yudisial
68. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
69. Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
70. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
71. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
72. Dewan Ketahanan Nasional
73. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
74. Ombudsman
75. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
76. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
77. Perpustakaan Nasional
78. Arsip Nasional
79. Lembaga Administrasi Negara
80. Badan Narkotika Nasional (BNN)
81. Badan Keamanan Laut
82. Badan Informasi Geospasial
83. Badan Pengelolaan Batam
84. Bank Indonesia
85. Otoritas Jasa Keuangan
86. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
87. Komisi Aparatur Sipil Negara
88. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

B. Pemerintah Provinsi

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Kepulauan Riau
6. Jambi
7. Bengkulu
8. Sumatera Selatan
9. Kepulauan Bangka Belitung
10. Lampung
11. Banten
12. Jawa Barat
13. DKI Jakarta
14. Jawa Tengah
15. Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Jawa Timur
17. Bali
18. Nusa Tenggara Barat
19. Nusa Tenggara Timur
20. Kalimantan Barat
21. Kalimantan Tengah
22. Kalimantan Selatan
23. Kalimantan Timur
24. Kalimantan Utara
25. Sulawesi Utara
26. Sulawesi Barat
27. Sulawesi Tengah
28. Sulawesi Tenggara
29. Sulawesi Selatan
30. Gorontalo
31. Maluku
32. Maluku Utara
33. Papua Barat
34. Papua

Plt. Direktur Tata Kelola dan
Kemitraan Komunikasi Publik,



Bambang Gunawan